

ANALISIS RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA

Ita siti patonah¹, Yekti Nilasari², Triani patra pertiwi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Email: itasitipatonah28@gmail.com

Abstrak:

Pengelolaan keuangan Pemerintah Desa yang semakin transparan, jujur, efektif dan efisiensi maka penulis melihat perlu untuk mengevaluasi atau menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa dalam suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pemerintahan desa dalam bidang keuangan dan sebagai acuan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Metodologi yang digunakan adalah: Pertama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Kedua, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data adalah program SPSS (*Statistical Program For Social Science*) versi 25 .

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa : (1) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak diduga berpengaruh signifikan terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Maka dari itu hipotesis Ho diterima dengan kaidah keputusan yaitu secara simultan tidak berpengaruh terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. (2) Ketergantungan dengan pusat berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Maka H1 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin tinggi ketergantungan dengan pusat maka semakin tinggi pula Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. (3) Ada pengaruh sebesar 88,5 % yang diberikan dari variabel Rasio Ketergantungan, Ketergantungan dengan Pusat terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Jadi, ada 11,5 % lainnya yang akan disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Kata Kunci: analisis rasio ketergantungan, keuangan daerah, kinerja keuangan.

Abstract:

The financial management of the Village Government is increasingly transparent, honest, effective and efficient, so the author sees the need to evaluate or analyze the financial performance of the Village government in an assessment process regarding the level of progress in achieving the implementation of village government in the financial sector and as a reference for analyzing the financial performance of a village government. This study aims to determine the ratio of regional financial dependence on financial performance in the regional revenue and expenditure budget.

The methodologies used are: First, this research uses quantitative methods. Second, the data collection method uses questionnaires, documentation and interviews. The data analysis technique is the SPSS (*Statistical Program For Social Science*) version 25 program.

The results of the research that has been conducted state that: (1) The Regional Financial Dependency Ratio is not expected to have a significant effect on the Value of Village Government Financial Performance. Therefore the Ho hypothesis is accepted with the decision rule that simultaneously has no effect on the Value of Village Government Financial Performance. (2) Dependence on the center has a significant effect on the Value of Village Government Financial Performance. Then H1 is accepted with the decision rule, namely the higher the dependence on the center, the higher the Village Government Financial Performance. (3) There is an influence of 88.5% given from the Dependency Ratio variable, Dependency with the Center on the Value of Village Government Financial Performance So, there is another 11.5% that will be contributed by other variables that are not included in this study.

Keywords: dependency ratio analysis, local finance, financial performance.

Pendahuluan

Perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di Negara. Sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah lainnya. (Nordiawan, 2012).

Tata pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pertanggungjawaban dan penyusunan APBDes. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa pembangunan Desa. Desa memiliki wewenang dalam mengelola keuangannya, dan juga memiliki kewajiban untuk menyusun APBDes dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat maka Desa harus menyusun APBDes. (Sobaruddin, 2019).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk akuntabilitas dalam mewujudkan kinerja pemerintah, dimana pengukuran kinerja dapat membantu dalam mengelola dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja sangatlah penting bagi pemerintah. Pengukur kinerja laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk mengetahui baik buruk laporan keuangan. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk mengetahui secara efektif laporan keuangan, dimana dapat diketahui perkembangan laporan keuangan dari ke masa yang akan datang. (Mardiasmo, 2009).

Menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola laporan keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio terhadap keuangan pemerintah daerah. Kinerja laporan keuangan pemerintah Desa akan membantu kepala desa dalam mengambil keputusan untuk menggunakan dana APBDes secara baik yang telah disediakan pemerintah pusat. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu mengetahui informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan posisi keuangan suatu pemerintah daerah. (Wiratna, 2015)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, ada beberapa perbedaan dengan penelitian penulis yang sedang diteliti antara lain : Vilmia Farida Dkk (2018) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, yang menyimpulkan bahwa berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparasi. Adapun peneliti lainnya oleh Siti Ainul Wida Dkk (2017) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kbpupaten Bayuwangi yang menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 adalah Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan Slokasi Dana Desa di 9 Desa Kecamatan Rogojompi telah berlangsung sebesar 100% dan memperoleh nilai A. Hal ini berarti akuntabilitas pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perencanaan ADD telah dilakukan kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan bank di tingkat dusun, di tingkat desa, maupun di tingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, LPMD, serta perwakilan dari masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei, dimana penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data dan mengukur hasil jawaban kuesioner menggunakan *skala likert* lima point dan Skala pengukuran ketergantungan menggunakan *skala rasio*.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh aparat desa dan masyarakat yang sudah di sensus dan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang berjumlah 13 responden. Dengan teknik sampling yang digunakan yaitu *sensus dan laporan APBDes*.

Dalam melakukan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel ke dalam 2 kelompok : Variabel independen dalam penelitian ini adalah ketergantungan keuangan, Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data, salah satunya adalah Angket atau kuesioner dalam penelitian ini yaitu 20 pertanyaan. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Wawancara ditujukan untuk wawancara dengan staf bidang yang berkaitan dengan kinerja keuangan Desa. Bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk mengukur analisis data. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah *Skala Likert* dan *Skala Rasio* pada laporan realisasi APBDes periode tahun 2020-2022 .

Teknik analisis yang dipakai Pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah dengan komputer menggunakan program SPSS (*Statistical Program For Social Science*) versi 25 dengan tujuan mendapatkan hasil perhitungan yang akurat dan memperoleh dalam melakukan pengelolaan data, sehingga lebih cepat dan tepat.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Normalitas

Pengujian Data

1. Uji F
2. Uji T
3. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Desa

No	TA	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	(%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
1	2020	999.538.500	1.422.967.100	0,69	Sangat Tinggi
2	2021	686.443.569	1.631.807.300	0,42	Sedang
3	2022	1.432.581.192	1.534.018.692	0,93	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Desa tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2020 persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa sebesar 0,69 %, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,42% karena pemerintah pusat daerah menanggulangi pandemi. dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,93% karena pandemi sudah mulai teratasi jadi pemerintah pusat daerah menjadi stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat/provinsi.

Analisis Data

Hasil Uji Validasi

Tabel 4.2 Hasil Uji Validasi

Butir	Nilai Corrected Item Total		Sig	R tabel	Kriteria
	Correlation / Rhitung				
1	0,965		0,000	0,553	Valid
2	0,613		0,000	0,553	Valid
3	0,981		0,000	0,553	Valid
4	0,769		0,000	0,553	Valid
5	0,670		0,000	0,553	Valid
6	0,818		0,000	0,553	Valid
7	0,603		0,000	0,553	Valid
8	0,981		0,000	0,553	Valid
9	0,758		0,000	0,553	Valid
10	0,679		0,000	0,553	Valid

Maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan memiliki status valid, karena nilai r_{hitung} (*Corrected Item Total Correlation*) $> r_{tabel}$ sebesar 0,553.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.75499011
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.142
	<i>Positive</i>	.109
	<i>Negative</i>	-.142
<i>Test Statistic</i>		.142
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi **0.200** $>$ **0.05**. maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi **normal**.

Hasil Uji Realibilitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.908	10

Berdasarkan Hasil Uji Realibilitas diketahui Nilai cronch alfa $0,908 > 0,6$ maka dapat dinyatakan Reliabilitas atau memenuhi persyaratan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji T

Tabel 4.5 Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.383	4.900		.078	.940
	<i>Ketertarikan</i>	.965	.123	.941	1.850	.000

a. Dependent Variable: kinerja keuangan

Maka dari itu hipotesis H_0 diterima dengan kaidah keputusan yaitu secara simultan tidak berpengaruh terhadap nilai kinerja keuangan pemerintah desa.

Uji F

Tabel 4.6 Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	212.780	1	212.780	61.409	.000 ^b
	<i>Residual</i>	27.720	8	3.465		
	<i>Total</i>	240.500	9			

a. Dependent Variable: kinerja keuangan

b. Predictors: (Constant), ketergantungan

Maka dari itu H_1 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin tinggi ketergantungan dengan pusat maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah desa.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat nilai *r-square* dari penelitian ini menunjukkan angka 0,885. Artinya ada pengaruh sebesar 88,5 % yang diberikan dari variabel rasio ketergantungan, Ketergantungan dengan pusat terhadap nilai kinerja keuangan pemerintah desa kecamatan kadugede kabupaten kuningan. Jadi, ada 11,5 % lainnya yang akan disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941 ^a	.885	.870	1.861

a. Predictors: (Constant), ketergantungan

b. Dependent Variable: kinerja keuangan

Pembahasan

Dari hasil perhitungan rasio diatas diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Untuk memudahkan pembahasan, hasil perhitungan rasio pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Pemerintah Desa TA 2020-2022

No	Uraian	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2020	2021	2022	
1	<i>Rasio Ketergantungan</i>	0,69 %	0,42 %	0,93 %	0,94 %

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Desa tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2020 persentaase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa sebesar 0,69 %, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,42% karena pemerintah pusat daerah menanggulangi pandemi. dan pada tahun 2022 mengalami

kenaikan menjadi 0,93% karena pandemi sudah mulai teratasi jadi pemerintah pusat daerah menjadi stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat/provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Desa tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi atau ada kenaikan dan penurunan persentase. Persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Desa tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 0,93%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan persentase yaitu sebesar 0,42% meskipun pada tahun 2022 terjadi kenaikan persentase yaitu sebesar 0,93%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Desa sebesar 0,94% dan tergolong ke dalam kategori ketergantungan yang masih sangat tinggi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Maka dari itu hipotesis H_0 diterima dengan kaidah keputusan yaitu secara simultan tidak berpengaruh terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.
2. Ketergantungan dengan pusat berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Maka H_1 diterima dengan kaidah keputusan yaitu semakin tinggi ketergantungan dengan pusat maka semakin tinggi pula Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Ada pengaruh sebesar 88,5 % yang diberikan dari variabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Ketergantungan dengan Pusat terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Jadi, ada 11,5 % lainnya yang akan disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adliyana, D. (2021) *Kinsserja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020)*.
- Asrinda, Dizzy, S. R, et. al. 2019. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDes (studi kasus Desa Blulok Kecamatan Bondu Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Volume 17.Nomor.1
- Bre Mamana, K. H. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Periode 2013-2016 (Studi Kasus di Desa Margorejo). Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Ch. E. Sasuwuk, Nathania, et. al, 2016. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Potensi Pendapatan Asli Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Minahasa Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Dali, N., Akib, M. dan Haisa, W. (2021) " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, " *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 6(1), hal. 391-336.
- Dora, J. (2017) *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014*.

- Faradhiba, L, & Diana, N. 2018. Akuntansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-jombang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Volume 7. Nomor 07.
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*. Volume 8 Nomor 1.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Volume 1. Nomor 1.
- Ghozali, Imam 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25(edisi sembilan)* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Karlinayani, S. dan Ningsih, E.S. (2018) " Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues), " *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(2). HAL. 309-316.
- Labi, A. (2019) "Analisis kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015,". *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), hal. 1355-1370.
- Habibah (2019) *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut*.
- Harahap, H.F. (2020) " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ." *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), hal. 34-38.
- Harfi, M.Z. (2016) " Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, " *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3). hal. 407-422.
- Husain, H. (2020) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang*.
- Maemunah (2020) *Analisi Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018)*.
- Mahmudi (2019) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun., et. al. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marliani, N. (2022) " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020," *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi (JSMA)*, 14(1), hal. 11-20.
- Muarif dan Indriani, M. (2019) " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(4), hal. 618-634.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018) *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun (2006) *Tentang Pelaporan*

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Ropa, M.O. (2016) " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal EMBA*, 4(2), HAL. 738-747.
- Santoso, T.S. *et al.* (2021) " Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019), " *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(1), hal. 75-94.
- Saragih, A.O., Rahman, A. dan Lestari, T. (2020) " Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo), " *Equity Jurnal Akuntansi*, 1(1), hal. 1-7.
- Sobarudin (2019) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 - 2018)*.
- Sugiyono. (2017). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta, Cv: Bandung.
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, W. (2015) *Akuntansi Desa*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014) *Tentang Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014) *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Wardiah, Z. (2022) *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Konsep Value For Money (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*.